

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL
DAN UKURAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE
TAHUN 2010-2011**

***THE INFLUENCE OF REGIONAL REVENUE, CAPITAL
EXPENDITURE AND REGIONAL SIZE AGAINST
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT PROVINCE IN
INDONESIA YEAR PERIOD 2010-2011***

AFIFAH FIRDIYANTI

8335092909



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI REGULER

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

ABSTRAK

Afifah Firdiyanti, 2014: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode analisis menggunakan analisis regresi dengan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang berasal dari laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD).

Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2011. Total sampel penelitian ini adalah sebanyak 66 provinsi secara purposive sampling menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Metode analisis untuk menguji hipotesis adalah model regresi linear berganda dan koefisien korelasi menggunakan aplikasi program SPSS 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Sedangkan Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran daerah, kinerja pemerintah daerah provinsi, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)

ABSTRACT

Afifah Firdiyanti, 2014: The Influence Of Regional Revenue, Capital Expenditure And Regional Size Againsts Performance Of Local Government Province In Indonesia Year Period 2010-2011. Jakarta: Faculty of Economy Universitas Negeri Jakarta.

The purpose of this research to provide empirical evidence on the influence of regional revenue, government expenditure and regional size against performance of local government. Methods of analysis using regression analysis with three independent variables and one dependent variable. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD).

This research uses sample of 33 provinces in Indonesia in 2010-2011. Total samples are 66 provinces using purposive sampling. This research uses secondary data obtained from financial statement regional government and evaluation of local government performance (EKPPD). Methods of analysis to test the hypothesis are multiple linear regression and correlation coefficient uses SPSS 19 software.

Result of this research indicate that regional revenue significant positive influence on the performance of local government provinces in Indonesia, capital expenditure significant negative effect on the performance of local. While size had no significant influence to the performance of local government provinces in Indonesia

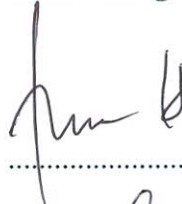
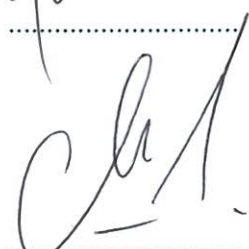

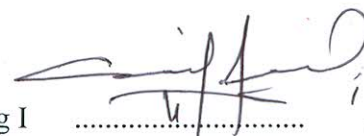

Keywords: Regional revenue, capital expenditure, regional size, performance of local government provinces, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Dedi Purwana ES., M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua		18 Juli 2014
<u>Choirul Anwar, SE, MBA, MAFIS, CPA</u> NIP. 19691004 200801 1 010	Sekretaris		21 Juli 2014
<u>Dra. ETTY Gurendrawati, M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Penguji Ahli		17 Juli 2014
<u>Unggul Purwohedi, SE., M.Si., Ph.D.</u> NIP. 19790814 200604 1 002	Pembimbing I		14 Juli 2014
<u>Yunika Murdayanti, M.Si., M.Ak.</u> NIP. 19780621 200801 2 001	Pembimbing II		17 Juli 2014

Tanggal lulus: Senin, 7 Juli 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2014

Yang membuat pernyataan



Afifah Firdiyanti
8335092909

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi”. Skripsi ini ditujukan sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama penyusunan Skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih pada:

1. Drs. Dedi Purwana ES, M. Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I.
5. Yunika Murdayanti, M.Si, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama dalam pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu mengusahakan yang terbaik dan memberikan doa, nasihat serta dorongan moril.
8. Teman-teman S1 akuntansi 2009 dan semua teman yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

9. Serta semua pihak lain yang membantu tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karena itu, peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini dapat sesuai dengan harapan pembaca. Akhir kata peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya serta teman-teman mahasiswa khususnya.

Jakarta, Juli 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN TEORITIK	
A. Deskriptif Konseptual	12
1. Teori Institutional.....	12
2. Pendapatan Asli Daerah	13
2.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
3. Belanja Modal	17
4. Ukuran Daerah	20
5. Kinerja Pemda.....	21
B. Hasil Penelitian Relevan	29
C. Kerangka Teoritik	33
D. Perumusan Hipotesis.....	35
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	36
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	36
C. Metode Penelitian	37
D. Populasi dan Sampling.....	38
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	42
1. Uji Asumsi Klasik	42
1.1. Uji Normalitas.....	42
1.2. Uji Multikolinearitas	43

1.3. Uji Heterokedastisitas	44
1.4. Uji Autokorelasi	45
2. Pengujian Hipotesis.....	46
2.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
2.2. Koefisien Determinasi.....	47
2.3. Uji F	47
2.4. Uji t	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	49
4.1. Uji Asumsi Klasik	53
4.1.1. Uji Normalitas	53
4.1.2. Uji Multikolinearitas	56
4.1.3. Uji Heterokedastisitas	57
4.1.4. Uji Autokorelasi.....	59
B. Pengujian Hipotesis.....	60
4.2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.2.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	62
4.2.2. Uji F	63
4.2.3. Uji-t	63
C. Pembahasan.....	66
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	66
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	67
3. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	68
BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi.....	72
C. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu	29
3.1. Tabel Uji Durbin Watson	45
4.1. Hasil Analisis Deskriptif Data.....	51
4.2. Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov.....	55
4.3. Hasil Uji Skewness dan Kurtosis	56
4.4. Hasil Uji Multikolonieritas	57
4.5. Hasil Uji Glesjer.....	59
4.6. Tabel Durbin Watson	60
4.7. Hasil Uji Autokorelasi	60
4.8. Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
4.9. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.10. Uji Statistik F	64
4.11. Uji t	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran.....	35
4.1. Normal P-Plot	54
4.2. Scatter Plot	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1	80
Lampiran 2	81
Lampiran 3	82
Lampiran 4	83
Lampiran 5	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengalihkan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah, desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi dengan tujuan agar pembangunan masing-masing daerah secara ekonomi dan pembangunan merata. Desentralisasi dimulai pada tahun 2001 dengan jumlah provinsi awal 27 provinsi dan sekarang berkembang menjadi 34 provinsi.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah tahun 2001. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap

pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah hingga pengelolaan aset daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam rangka memberikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi pemerintah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DAU, DBH dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009).

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah kini memiliki andil besar dalam menyusun APBD, dalam realisasi anggaran menggunakan sumber keuangan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Sumber keuangan didalam APBD digunakan untuk pengeluaran daerah, salah satunya yakni belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disertai penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi pendapatan asli daerah yang berbeda menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis suatu daerah dan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah antara provinsi yang satu dengan yang lain. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan disisi lain ada daerah

yang pembangunannya tertinggal karena memiliki pendapatan asli daerah yang rendah.

Belanja modal pemerintah daerah dialokasikan untuk perencanaan keuangan jangka panjang, terutama untuk pembiayaan pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Belanja modal memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun realisasi belanja modal seringkali dibawah target atau lebih redah dibandingkan anggarannya. Disamping itu, dalam kenyataanya masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja modal lebih kecil dibanding alokasi belanja pegawai. Pelaksanaan belanja modal dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kinerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan outcome optimal dari kegiatan dan program.

Ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa size perusahaan yang diukur menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relative stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur size perusahaan (Kusumawardani, 2012). Ukuran Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Kabupaten/Kota dengan total aset (ukuran) yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Semakin besar

ukuran suatu daerah akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, konsekuensinya pemerintah daerah memiliki tekanan yang besar dalam mengungkapkan kinerjanya.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Jadi pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dasar pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki hubungan komunikasi antar lembaga. Pengukuran kinerja diharapkan dapat memberikan informasi sehingga memungkinkan untuk menjembatani kinerja dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja juga bermanfaat untuk pejabat berwenang dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja yang berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Menurut UU No.32 tahun 2004 Pemerintah daerah mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat setelah adanya kewenangan otonomi daerah. Setiap daerah diwajibkan melaporkan LPPD dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diraih setiap daerah sesuai realisasi keluaran dan hasil yang telah direncanakan, sebagai timbal balik dan rekomendasi bagi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, hal tersebut berkaitan dengan pada pasal 2 PP No.3/2007. PP No. 3 tahun

2007 menjadi dasar diberlakukannya EKPPD, kemudian dilengkapi dengan PP No. 6 tahun 2008 (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012). Urusan wajib pemerintah daerah yakni mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi. Urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah sesuai fakta yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara berdasarkan pendayagunaan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemerintah daerah dibuat sesuai realisasi kinerja masing-masing daerah yang telah dilakukan pemerintah daerah bukan hanya program kegiatan yang sudah dijalankan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No.6 tahun 2008, maka Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi pencapaian kinerja dan tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan penetapan peringkat dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasal dari LPPD tahun anggaran 2010-2011 dan pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Hal tersebut salah satunya dapat mengevaluasi bagaimana kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang sudah diimplementasikan setiap pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dapat memotivasi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan, dimana harus transparan dan akuntabel.

Mustikarini dan Fitriasaki (2012) melakukan penelitian yang menguji apakah karakteristik daerah dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel karakteristik pemerintah daerah dan juga temuan audit BPK berpengaruh positif signifikan kecuali belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Sumarjo (2010) tentang karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. Penelitian tersebut mengambil sampel selama 1 periode hanya 2007 dengan 5 variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat

kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit. Peneliti menggunakan variabel independen PAD, belanja modal dan ukuran daerah serta variabel dependen tentang kinerja pemerintah daerah provinsi. Periode yang digunakan selama 2 periode selama 2010-2011. Penelitian tentang ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi masih sangat sedikit sehingga, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia ” yaitu :

1. Potensi pendapatan asli daerah yang berbeda menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah.
2. Masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja modal lebih kecil dibanding alokasi belanja pegawai.
3. Kabupaten/Kota dengan total aset (ukuran) yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya.

4. Pengukuran kinerja akan memotivasi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan yang akuntabel dan transparan.

C. Pembatasan masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti menggunakan provinsi di Indonesia sebagai data sekunder.
2. Periode Pengamatan hanya 2 tahun yaitu tahun 2010 dan 2011.
3. Variabel Independen yang diuji yaitu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah dengan variable dependen kinerja pemerintah daerah provinsi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji PAD, belanja modal dan ukuran daerah mempunyai pengaruh dengan kinerja pemerintah daerah provinsi., dalam penelitian terdahulu Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan ukuran daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya, Sudarsana (2012) yang menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap

kinerja pemerintah daerah. Oleh karena adanya inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti ingin menguji kembali apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi.

Peneliti juga menambahkan variabel belanja modal karena juga terdapat hasil inkonsisten dalam penelitian terdahulu. Sebagai contoh, penelitian Sudarsana (2012) dan Sumarjo (2010) terdapat perbedaan hasil yang mengukur pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan inkonsisten penelitian yang muncul maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi?
3. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yakni berguna bagi peneliti, pemerintah dan peneliti lainnya.

1. Bagi literatur, penelitian ini bermanfaat untuk menambah bukti dan pengetahuan penulis tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

2. Bagi pemerintah, memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terutama untuk mahasiswa yang hendak melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Institusional

Teori institusional atau teori kelembagaan adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Zulker (1987) dalam Donaldson (1995) menyatakan bahwa ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan symbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima (*taken for granted*) sebagai norma-norma dalam konsep organisasi.

Menurut Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (2000), organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Menurut teori institusional bahwa pemerintah daerah merupakan suatu organisasi dalam sektor publik yang dapat dipengaruhi oleh masyarakat, secara umum dalam struktur organisasi sektor publik telah

ditentukan oleh legitimasi. Pemerintah daerah sendiri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, serta masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi dimana masyarakat membutuhkan segala sesuatu atas kebutuhannya yang menyebabkan institusi pemerintah harus bertindak dengan sangat baik untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Organisasi sektor publik sangatlah luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks (Henley et al., 1989; Jones dan Pendlebury, 2010). Menurut Mahmudi (2012) organisasi sektor publik sendiri mempunyai karakteristik, yaitu:

1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik.
2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara.
3. Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau negara.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut UU nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Herlina Rahman (2005:38), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dipandang secara luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

2.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya dalam UU nomor 33 tahun 2004 pasal 6 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang

berasal dari retribusi, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Yang termasuk dalam Pajak Provinsi menurut UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas: (i) pajak kendaraan bermotor, (ii) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, (iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (iv) pajak air permukaan, dan (v) pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas: (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, (iii) pajak hiburan, (iv) pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) pajak mineral bukan logam dan batuan dan (vii) pajak parkir, (viii) pajak air tanah, (pajak sarang burung walet, (x) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta (xi) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi daerah

Dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian, yaitu retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, biaya cetak KTP dan akta lahir, pengujian kendaraan bermotor, dan lainnya), retribusi jasa usaha (tempat khusus parkir, rumah potong hewan, terminal dan lainnya), dan retribusi perijinan tertentu (IMB, ijin gangguan, ijin peruntukkan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lainnya). Daerah kabupaten/kota yang memiliki retribusi relatif besar jumlahnya umumnya adalah daerah

perkotaan, karena di daerah-daerah itu terdapat potensi penerimaan retribusi yang berasal dari sarana dan retribusi pasar (Elmi 2002).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang no. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Bagian laba perusahaan milik daerah
- b) Bagian laba lembaga keuangan bank
- c) Bagian laba lembaga keuangan non bank
- d) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi
- e) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
6. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang perlu digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dari penjelasan sebelumnya dapat dirumuskan:

pendapatan asli daerah = pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relative material. (Kemenkeu, 2012)

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan

maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh Pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelanan public yang memberikan dampak jangka panjang secara financial. (Abdullah, 2006).

Menurut BPKP, Belanja modal meliputi antara lain:

- a. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanag, pengosongn, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain, biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas

sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap digunakan.

- e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja modal diatas. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan, misalnya belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila

(Abdul Halim: 2002, 73):

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dapat

dimasukkan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan penambahan aset tetap (fasilitas umum) pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan sebelumnya dapat belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut (Abdul Halim:2002, 78):

Belanja modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi dan jaringan + belanja aset tetap lainnya

4. Ukuran Daerah (Size)

Size adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa size perusahaan yang diukur menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur size perusahaan (Kusumawardani, 2012).

Ukuran Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset pemerintah

daerah digunakan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya. Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Kabupaten/Kota dengan total aset (ukuran) yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Melalui perencanaan kebutuhan aset yang memadai, dengan pengadaan sesuai dengan ketentuan dapat menjadi asset pemerintah daerah yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat.

5. Kinerja Pemerintah daerah

Michael, dan Troy (2000) dalam Gugus Irianto (2006) menjelaskan untuk mengukur perbandingan kinerja Pemerintah daerah dengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan data yang bersifat akuntabel dari pemerintah daerah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika input dari masyarakat ini tidak di akomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun.

Pengukuran kinerja Pemerintah daerah lebih sulit diukur dibandingkan kinerja perusahaan pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh orientasi yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan pada dasarnya profit oriented, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Keuntungan perusahaan selalu dihitung dengan satuan mata uang. Keuntungan perusahaan setiap tahunnya juga selalu dilaporkan melalui laporan laba rugi. Dengan demikian tidak ada kesulitan untuk mengetahui korelasi antara kinerja karyawan perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berbeda halnya dengan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dalam kegiatan operasionalnya. Kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kepuasan masyarakat yang menerima layanan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mengukur kualitas barang dan jasa, membandingkan hasil kegiatan dengan target dan menilai efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap masyarakat, sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam memonitor dan memperbaiki kinerja

serta focus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Sistem pengukuran kinerja yang menggunakan kerangka pengukuran kinerja dengan pendekatan proses mulai dari input hingga dampaknya (Mohamad Mahsun, 2006) adalah sebagai berikut:

1. Masukan (input)

Indikator input harus dibedakan dengan inputya sendiri. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Sedangkan indicator input adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (melaksanakan kegiatan). Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis kesesuaian alokasi sumberdaya dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tolak ukur input relatif mudah diukur dan telah dipergunakan secara luas, namun tidak terlepas dari permasalahan antara lain:

- a. Tingkat intensitas keterlibatan SDM dalam pelaksanaan kegiatan tidak digambarkan dalam pengukuran SDM.
- b. Pengukuran biaya tidak akurat karena banyak biaya-biaya yang dibebankan pada suatu kegiatan tidak memiliki kaitan dengan pencapaian sasaran kegiatan tersebut.

Banyak biaya input seperti biaya pendidikan dan pelatihan, gaji bulanan karyawan pelaksana, penyusutan aktiva yng

dipergunakan, seringkali tidak diperhitungkan sebagai biaya kegiatan. Tolak ukur input tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu kegiatan apabila diterapkan tidak menggunakan pertimbangan yang tepat. Besarnya input dengan tingkat keberhasilan atau kinerja suatu kegiatan memang memiliki hubungan. Namun, tingkat korelasi ini tidak sepenuhnya tepat, karena input yang besar tidak selalu menjamin tercapainya suatu keberhasilan pemerintah. Input dalam kinerja pemerintah daerah dapat berupa pelatihan pegawai dengan tujuan melatih pegawai agar kinerjanya maksimal.

2. Proses

Indikator ini berisi gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi:

1. Frekuensi proses
2. Ketaatan terhadap ketentuan atau standar yang ditentukan dalam melaksanakan proses.
3. Keluaran (output)

Indikator output harus dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Sedangkan indikator output adalah alat untuk mendeskripsikan bagaimana organisasi mengelola input tersebut dalam menghasilkan output dan outcome. Dengan membandingkan

output, suatu unit kerja dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai rencana. Untuk dapat menilai kemajuan suatu kegiatan, tolak ukur output harus dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai kuantitas output, kualitas output dan efisiensi dalam menghasilkan output. Proses dalam kinerja menjadi hal yang penting, dikarenakan dalam proses dapat terukur, terencana dan fokus menjadi tumpuan untuk mencapai kinerja hasil yang baik.

4. Hasil (outcome)

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Indikator kinerja outcome mengukur outcome yang lebih dapat dikendalikan bagi organisasi. Untuk outcome yang melibatkan banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor lain diluar kendali organisasi sebaiknya diukur sebagai manfaat atau dampak.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai:

1. Peningkatan kuantitas setelah kegiatan selesai
2. Perbaikan proses setelah kegiatan selesai
3. Peningkatan efisiensi setelah kegiatan selesai

4. Perubahan perilaku setelah kegiatan selesai
5. Peningkatan kualitas setelah kegiatan selesai
6. Peningkatan efektivitas setelah kegiatan selesai
7. Peningkatan pendapatan setelah kegiatan selesai

5. Manfaat

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

6. Dampak

Indikator dampak memberikan gambaran mengenai efek langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan-tujuan program. Dampak merupakan outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator kinerja dampak, mengukur outcome yang makro dan melibatkan pihak lain diluar organisasi.

Dalam kinerja Pemerintah ini pengukurannya melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dimana EKPPD sendiri bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Menurut Peraturan Mendagri No.73 tahun 2009 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses

pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan menggunakan SKPD, pemerintahan daerah, antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional.

Tahapan penilaian EKPPD dilakukan sebagai berikut menurut PP 73/2009:

1. Mengumpulkan dan memvalidasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dari seluruh SKPD.
2. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data capaian kinerja dari seluruh SKPD.
3. Mengkaji dan menganalisis konfirmasi, verifikasi, validasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.
4. Mendiskusikan dan menginterpretasikan hasil penilaian capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan system pengukuran dan indikatornya untuk membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya
5. Memperingkat kinerja masing-masing SKPD dengan penilaian menggunakan system pengukuran IKK, pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi:
 - a. Administrasi umum
 - b. Capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan
 - c. Penilaian atas realisasi pelaksanaan program tahun yang dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
 - d. Penilaian seluruh realisasi kinerja SKPD

Pengukuran EKPPD berdasarkan kinerja pemerintah daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK sendiri adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK yang dimaksud berada dalam satu koridor system pengukuran kinerja dari masing-masing SKPD.

Penilaian IKK tersebut berdasarkan pada aspek tataran (PP 73/2009):

1. Pengambil Kebijakan, meliputi:
 - a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah
 - b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemerintah daerah dan pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
 - c. Keselarasan antara kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
 - d. Efektivitas hubungan antara Pemerintah daerah dan DPRD
 - e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
 - f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
 - g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan
 - h. Intensitas dan evektifitas proses konsultasi public antara Pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan public yang strategis dan relevan untuk daerah

- i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil
 - j. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan obligasi daerah
 - k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD
 - l. Pengelolaan potensi daerah
 - m. Inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Pelaksana kebijakan daerah:
- a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
 - c. Tingkat capaian SPM
 - d. Penataan kelembagaan daerah
 - e. Pengelolaan kepegawaian daerah
 - f. Perencanaan pembangunan daerah
 - g. Pengelolaan keuangan daerah
 - h. Pengelolaan barang milik daerah
 - i. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Gugus Irianto (2006)	<i>Pengaruh Karakteristik Tujuan</i>	a) <i>Karakteristik Tujuan Anggaran</i>	Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran

		<i>Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah daerah di Kabupaten Kupang</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>b) Perilaku Aparat Pemerintah</i> <i>c) Sikap Aparat Pemerintah</i> <i>d) Kinerja Aparat Pemerintah</i> 	secara keseluruhan menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap perilaku aparat pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam rencana penyusunan anggaran. Begitu juga dengan karakteristik tujuan anggaran terhadap sikap aparat berpengaruh signifikan tetapi dengan kinerja aparat pemerintah hanya serentak.
2.	Hendro Sumarjo (2010)	<i>Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>a) Ukuran (Size)</i> <i>b) Kemakmuran(wealth)</i> <i>c) Ukuran Legislatif</i> <i>d) Leverage</i> <i>e) Intergovernmental Revenue</i> <i>f) Kinerja Keuangan Pemerintah daerah</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran (size), pemerintah daerah, leverage, dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah disebabkan masih kecilnya peran pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat
3.	Dwi Martani dan Fahri Zaelani (2011)	<i>Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>a) Kelemahan Pengendalian Intern</i> <i>b) Ukuran</i> <i>c) Pertumbuhan</i> <i>d) PAD</i> <i>e) Kecamatan Populasi</i> 	Ukuran pemerintah berpengaruh negative signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern, sedangkan pertumbuhan pemerintah daerah berpengaruh positif

		<i>daerah Studi Kasus di Indonesia</i>		signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif pula terhadap kelemahan pengendalian intern sedangkan jumlah kecamatan tidak berpengaruh secara kompleks terhadap kelemahan pengendalian intern.
4.	Debby Fitriyani dan Widya Astuti Mustikarini (2012)	<i>Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Ukuran Pemerintah daerah</i> b) <i>tingkat kekayaan daerah</i> c) <i>tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat</i> d) <i>Belanja daerah</i> e) <i>Temuan audit</i> f) <i>Kinerja Pemerintah daerah</i> 	Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negative signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah daerah.
5.	Rora Puspita dan Dwi Martani	<i>Analisis pengaruh dan kinerja dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemerintah daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>PAD</i> b) <i>Tingkat ketergantungan</i> c) <i>Ukuran pemerintah daerah</i> d) <i>Kompleksitas pemerintahan</i> e) <i>Belanja daerah</i> 	Ketergantungan daerah (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap presentasi pengungkapan. Kinerja daerah dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan dan

				total pengungkapan untuk website pemerintah daerah.
6.	Hafidh Susila Sudarsana (2012)	<i>Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Ukuran Pemerintah daerah</i> b) <i>tingkat kekayaan daerah</i> c) <i>tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat</i> d) <i>Belanja modal</i> e) <i>Temuan audit</i> f) <i>Kinerja Pemerintah daerah</i> 	tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia. Sedangkan ukuran daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia.
7.	Nugroho dan Rohman (2012)	<i>Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PENDAPATAN ASLI DAERAH sebagai variabel intervening</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Belanja Modal</i> b) <i>PAD</i> c) <i>Kinerja Keuangan</i> 	belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan, belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.
8.	Julitawati, et al (2012)	<i>Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>PAD</i> b) <i>Dana Perimbangan</i> c) <i>Kinerja keuangan</i> 	pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/ kota
9.	Saptaningih Sumarmi	<i>Pengaruh PAD, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>PAD</i> b) <i>DAU</i> c) <i>DAK</i> d) <i>Belanja modal</i> 	pendapatan asli daerah dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAU berpengaruh

		<i>Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta</i>		negative signifikan terhadap alokasi belanja modal.
--	--	---	--	---

C. Kerangka Teoritik

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Setiap daerah harus memiliki kewenangan dalam menggali sumber daya yang potensial, memanfaatkan dan mengelola sumber keuangannya yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2011) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan diantaranya berupa pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum yang layak, dan fasilitas lain yang

dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah perlu menyusun prioritas belanja modal dan perencanaan yang baik sehingga dapat menyiasati kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja modal seharusnya menunjukkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka peningkatan kinerja Pemerintah daerah akan lebih baik. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Nugroho dan Rohman (2011) pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin dalam belanja modal yang dilakukan pemerintah.

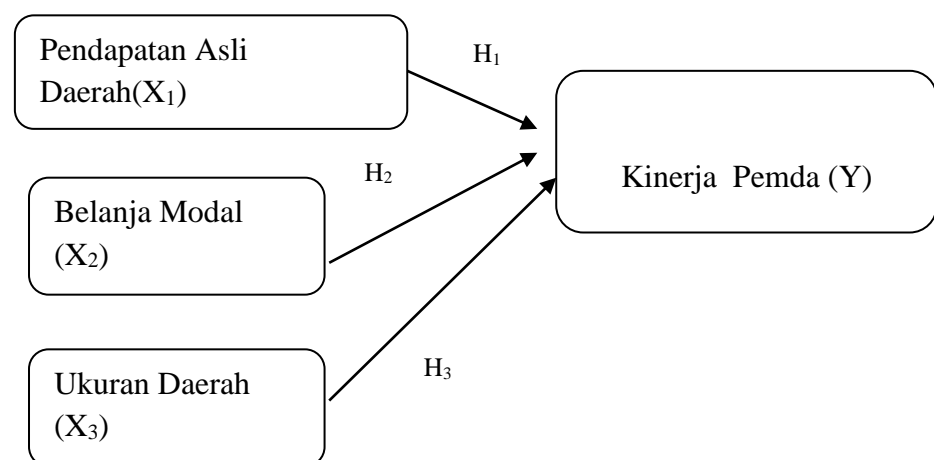
3. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pernyataan ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Selain pemanfaatan pendapatan asli Pemerintah daerah dengan baik, maka perlu ditingkatkan pula pengelolaan aset daerah. Hal ini dimaksudkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga didukung oleh penataan kembali dan inventarisasi aset daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah diperlukan prasarana dan infrastruktur seiring dengan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang baik. Dengan demikian, semakin besar

ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut.

Berikut adalah kerangka pemikiran atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

H₂ : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

H₃ : Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia untuk memberikan bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia
2. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia
3. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh ukuran terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2010 dan 2011 milik pemerintah provinsi yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) . Tempat penelitian terhadap laporan keuangan tersebut diambil dari website resmi BPK yaitu www.bpk.go.id, www.djpk.depkeu.go.id dan www.otda.kemendagri.go.id . Peneliti mencari data-data yang dibutuhkan di website tersebut, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah periode 2010-2011

dan pemeringkatan hasil EKPPD. Waktu penelitian dilakukan sesuai dengan kesempatan yang diberikan untuk mencari dan mengolah data yang telah didapat yaitu pendapatan asli daerah bulan Juni 2013. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pendapatan asli daerah ada atau tidaknya pengaruh antara pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi.

Provinsi di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena lebih memberikan informasi yang lebih jelas dibandingkan dengan kabupaten/kota di Indonesia. Provinsi lebih menggambarkan keadaan sebenarnya suatu daerah. Selain itu, penulis memilih Provinsi di Indonesia sebagai fokus populasi penelitian agar diperoleh hasil yang spesifik dan dapat digeneralisasi untuk sampel tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya yang menekankan pendapatan asli daerah pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan numerik dan analisis data menggunakan prosedur statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia periode tahun 2010 dan 2011.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan cara pengambilannya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak lain, berasal dari sumber internal/eksternal organisasi. Data berdasarkan sifatnya adalah kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang bersifat numerik (angka). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dipublikasi oleh website www.djpk.depkeu.go.id dan www.bpk.go.id dan untuk kinerja pemerintah daerah didapat melalui website www.otda.kemendagri.go.id selama tahun 2010-2011. Selain itu, data diperoleh dari buku dan penelitian sebelumnya yang terkait

D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (M. Iqbal, 2008:43) sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Populasi pendapatan asli daerah penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia pendapatan asli daerah tahun 2010-2011. Sampel pendapatan asli daerah penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan penerangan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah periode tahun 2010-2011. Data sampel yang digunakan sebanyak 33 provinsi di Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel penelitian dapat memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi daerah yang terdapat di Indonesia pendapatan asli daerah tahun 2010-2011;
2. Pemerintah provinsi daerah yang rutin menerbitkan Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK periode 2010-2011;
3. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasi oleh BPK dan DJPK.
4. Hasil pemeringkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh kemendagri.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Analisis variabel dalam penelitian digunakan untuk mendukung data yang akan diteliti sesuai permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sehingga perlu didefinisikan secara operasional masing-masing variabel tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel objek, yaitu:

1. Variabel bebas/independen (X)

Menurut Sugiyono (2012) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)
 - 1) Definisi konseptual

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004) diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Definisi operasional

Proxy yang digunakan dalam variabel ini adalah jumlah pendapatan asli daerah seluruh provinsi di Indonesia dalam jutaan rupiah. Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

2. belanja modal (X_2)

1) Definisi konseptual

Pengeluaran pemerintah daerah yang dilkakukan dalam rangka menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2) Definisi operasional

Proxy yang digunakan dalam variabel ini adalah jumlah belanja modal seluruh provinsi di Indonesia dalam jutaan rupiah. Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

$$\text{Belanja modal} = \text{belanja tanah} + \text{belanja peralatan dan mesin} + \text{belanja gedung dan bangunan} + \text{belanja jalan, irigasi dan jaringan} + \text{belanja aset tetap lainnya}$$

3. ukuran daerah (X_3)

1) Definisi konseptual

Total aset adalah penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan harta perusahaan secara keseluruhan.

2) Definisi operasional

Proxy yang digunakan dalam variabel ini adalah total aset seluruh provinsi di Indonesia dalam jutaan rupiah.

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah provinsi.

1) Definisi konseptual

Gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

2) Definisi operasional

Proxy yang digunakan dalam variabel ini adalah jumlah skor kinerja seluruh provinsi di Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

Metode analisis untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 19.0. Penggunaan metode analisis dalam regresi pendapatan asli daerah pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak semua data dapat dilakukan regresi. Pengujian asumsi klasik yaitu:

1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005:97).

Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan kolmogrov smirnov test, sedangkan nilai asymp sig. > 0.05 , maka berarti data berdistribusi normal, sedangkan nilai asymp sig. < 0.05 , berarti data berdistribusi tidak normal. Untuk lebih memperjelas sebaran data maka dilakukan uji normalitas kedua yaitu dengan melihat rasio skewness dan rasio kurtosis. Data residual dikatakan normal apabila rasio skewness dan rasio kurtosis berada diantara $\pm 1,96$ untuk tingkat signifikansi 5%. Kemudian juga dilakukan Uji Normal Probability Plot. Pendapatan asli daerah uji normal Probability Plot, jika data normal maka titik-titik yang terbentuk pendapatan asli daerah grafik P-P Plot tidak terpecah menjauhi garis lurus.

1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Menurut Ghazali (2005:105), pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Nilai Variance Inflation Factor (VIF)

Jika nilai regresi memiliki nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas.

Sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresinya.

3. Nilai Tolerance

Jika model regresi memiliki nilai tolerance $< 0,1$ maka terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai tolerance $> 0,1$ maka pendapatan asli daerah model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.

1.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual*. Suatu pengamatan yang lain jika *variance* residual dari suatu pengamatan lebih berbeda maka disebut heterokedastisitas. Umumnya ini terjadi pendapatan asli daerah data *cross-section*, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Metode pengujian yang dapat digunakan adalah uji glesjer dan melihat pola grafik regresi. Uji glesjer dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Jika menggunakan pola grafik regresi agar mengetahui masalah heterokedastisitas maka dapat dilihat pola grafiknya sebagai berikut (Ghozali, 2005:125):

- a. jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada menyebar pola tertentu yang diatur (bergelombang, melebar dan menyempit) maka diindikasikan telah

terjadi heterokedastisitas.

- b. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pendapatan asli daerah sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pendapatan asli daerah periode t dengan kesalahan pengganggu pendapatan asli daerah periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Ghozali, 2006:111). Uji durbin Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu yang mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel log diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson, yaitu:

Tabel 3.1

Tabel Uji DW

Interval	Kriteria
$dW < dL$	Ada autokorelasi
$dL < dW < dU$	Tanpa kesimpulan
$dU < dW < 4-dU$	Tidak ada korelasi
$4-dU < dW < 4-dL$	Tanpa kesimpulan
$dW > 4-dL$	Ada autokorelasi

2. Pengujian Hipotesis

Setelah uji prasyarat dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), uji F secara simultan dan uji t secara parsial.

2.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas maka dapat diterapkan model regresi berganda sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 TA_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

KP = Kinerja Pemerintah daerah Provinsi

PAD = Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah serta retribusi.

BM = Belanja Modal

TA = Total aset, total aset ini merupakan indikator perhitungan dari ukuran daerah.

ε = Koefisien error

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah

kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006:101).

2.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pendapatan asli daerah intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006:100).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

2.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini untuk mengetahui apakah model regresi layak dan tepat untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini atau tidak. Apabila hasilnya signifikan berpengaruh berarti model yang diuji merupakan model yang baik bila dipakai dalam penyederhanaan dunia nyata. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan < 0.05 maka model regresi adalah model yang tepat.

- b. Jika nilai signifikan > 0.05 maka model regresi adalah model yang tidak layak dan tidak tepat.

2.4. Uji t (*t-test*)

Uji statistik t pendapatan asli daerah dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:102). Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% yang berarti rasio kesalahan α pengambilan keputusan dibatasi sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dasar pengambilan keputusan (Santoso 2000:168)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengukur variabel independen adalah yang mempengaruhi dilambangkan dengan x , dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, belanja modal dan total aset. Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi dilambangkan dengan y , dalam penelitian ini yang digunakan adalah kinerja pemerintah daerah provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi daerah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010-2011;
2. Pemerintah provinsi daerah yang rutin menerbitkan Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK periode 2010-2011;
3. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasi oleh BPK dan DJPK.
4. Hasil pemeringkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh kemendagri.

Sebelum dilakukan pengujian, peneliti terlebih dahulu memerhatikan deskripsi data laporan keuangan dan skor kinerja pemerintah daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan skor kinerja pemerintah daerah tahun 2010-2011. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Laporan Realisasi Anggaran DJPK Kementerian Keuangan 2010-2011. Data di download melalui website www.djpk.depkeu.go.id dan meminta secara langsung melalui kantor BPK. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2010 dan 2011. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 propinsi. Berdasarkan teknik pengambilan sampel pada bab III, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 provinsi selama 2 periode yaitu 2010 dan 2011. data mengenai setiap variabel dapat dilihat dalam lampiran.

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil penelitian meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan pembahasan. Pengujian data dengan metode analisis multiple regression *software Stastical Package for Social Sciences (SPSS) 19.0*. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai data dan penyebaran data yang digunakan dalam penelitian ini. Penggambaran data yang dimaksud yaitu nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum serta minimum yang menggambarkan penyebaran

data penelitian ini. Dari statistik deskriptif sebelumnya, dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.1.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	66	1.3206	3.1482	2.195912	.3806154
PAD	66	77842	17825987	1978364.18	3145144.736
BM	66	108996	7316333	779115.88	1130328.202
TA	66	807502	53241620	9321873.15	9039513.929
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan Tabel deskriptif diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 66, di mana rata-rata pendapatan asli daerah pada provinsi sebanyak Rp 1.978.364.180.000 dengan pendapatan asli daerah minimum sebesar 77.842 ditunjukkan pada Provinsi Maluku Utara tahun 2010 dengan pendapatan asli daerah Rp 77.842.742.792 dan maksimum 17.825.987 untuk Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sebesar Rp 17.825.987.294.43.

Pendapatan asli daerah menggambarkan atas kemampuan pemerintah provinsi menggali potensi yang ada dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Provinsi yang menunjukkan nilai terendah yaitu Maluku Utara. Hal menunjukkan bahwa, Maluku Utara belum mengembangkan secara maksimal sektor pajak, retribusi dan pengelolaan sumber

daya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebaliknya dengan Provinsi DKI Jakarta yang telah menggali potensi daerah secara maksimal.

Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap ditekankan pada operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja modal menunjukkan nilai rata-rata 779.115,88, dengan nilai terendah ditunjukkan pada nilai 108.996 pada Provinsi Gorontalo 201 dengan belanja modal Rp 108.996.106.112 dan nilai tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta 2011 dengan nilai 7.316.333 sebesar Rp 7.316.333.334.751 hal ini menunjukkan bahwa untuk Provinsi Gorontalo membelanjakan kebutuhannya untuk aset dan fasilitas umum paling rendah sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan dana yang besar untuk belanja modal.

Berdasarkan tabel deskriptif diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 66, di mana rata-rata total aset pada provinsi sebanyak 9.321.873 dengan total aset terendah sebesar 807.502 ditunjukkan pada Provinsi Sulawesi Barat tahun 201 dengan total aset Rp 807.502.920,80 dan maksimum 53.241.620 untuk Provinsi Papua tahun 2011 dengan total aset Rp 53.241.620,000,000, Total aset menggambarkan bahwa pemerintah provinsi telah memaksimalkan pengeluaran dalam pembelian aset pemerintah daerah dimana pengembangan layanan fasilitas umum semakin baik dari setiap tahunnya.

Kinerja pemerintah daerah provinsi mempunyai nilai rata-rata dengan nilai terendah dan nilai tertinggi dengan nilai terendah ditunjukkan untuk Provinsi Jambi tahun 2010 dan tertinggi ditunjukkan untuk Provinsi Jawa Timur 2011, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah daerah pada Provinsi Jambi 2010 terbilang rendah sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat 2011 kinerja pemerintah daerah terbilang sangat tinggi, hal ini ditunjukkan pada hasil EKPPD pada Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dan Provinsi Jambi menduduki peringkat 33. Kinerja pemerintah daerah sendiri dapat dilihat dari baik atau tidaknya pelayanan yang dilakukan dan diberikan secara publik, kinerja yang tinggi dapat menunjukkan pelayanan yang baik.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap ada tidaknya menyimpang dari asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi liner berganda berupa: normalitas, autokolerasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas. Berikut akan dipaparkan atas data yang digunakan dalam penelitian.

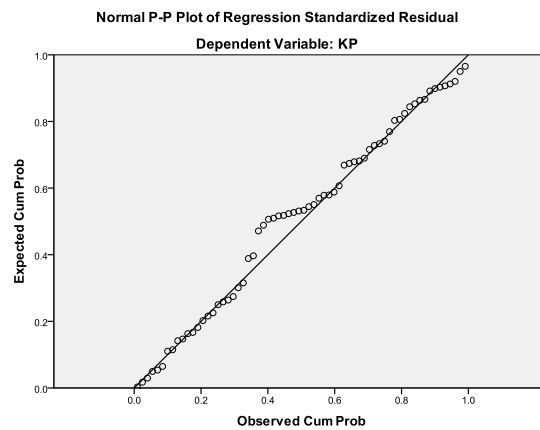
4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi pada variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui 3 cara yaitu analisis grafik, uji *Kolmogorov-Smirnov* dan uji *skewness kurtosis*.

Proses pengujian pada Normal P-Plot Residual dari variabel independen, dimana :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1.



Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari penelitian yang dilakukan tampak pada Gambar 4.1 terlihat bahwa data berdistribusi normal karena data menyebar di sekitar sumbu diagonal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*.

Tabel 4.2**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KP	Ln_PAD	Ln_BM	Ln_TA
N		66	66	66	66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.195912	13.6473	13.0801	15.7150
	Std. Deviation	.3806154	1.22030	.90606	.97195
Most Extreme Differences	Absolute	.087	.055	.102	.078
	Positive	.074	.055	.102	.078
	Negative	-.087	-.052	-.060	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.711	.448	.828	.634
Asymp. Sig. (2-tailed)		.693	.988	.499	.816

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dalam tabel 4.2 *Kolmogorov-Smirnov* dapat terlihat bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang memiliki nilai $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Berikutnya analisis statistik dengan uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Skewness berhubungan dengan simetri distribusi. Skewness variabel adalah variabel yang nilai mean-nya tidak ditengah-tengah distribusi. Sedangkan kurtosis berhubungan dengan puncak suatu distribusi. Jika variabel terdistribusi secara normal maka nilai skewness dan kurtosisnya sama dengan nol.

Tabel 4.3
Skewness dan Kurtosis

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Standardized Residual	66	-.466	.295	-.085	.582
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari nilai skewness dan kurtosis diatas dapat dihitung nilai Zskewness dan Zkurtosis sebagai berikut:

$$Z_{skewness} = \frac{0,466}{\sqrt{6/66}} = 1.548 \qquad Z_{kurtosis} = \frac{0,085}{\sqrt{24/66}} = 0,135$$

Nilai z dibandingkan dengan untuk alpha 0,05 nilai kritisnya ± 1.96 . Terlihat bahwa rasio skewness 1.548 dan kurtosis 0,135. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear diantara variabel-variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghozali (2006:105), pada umumnya jika nilai VIF predictor tidak melebihi nilai 10, Nilai lain yang dipakai adalah nilai tolerance $> 0,10$, jika nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak ada multikolinearitas pada model regresi dan

sebaliknya nilai tolerace $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka dapat diartikan terdapat multikolinearitas pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ln_PAD	.499	2.006
Ln_BM	.572	1.748
Ln_TA	.397	2.522

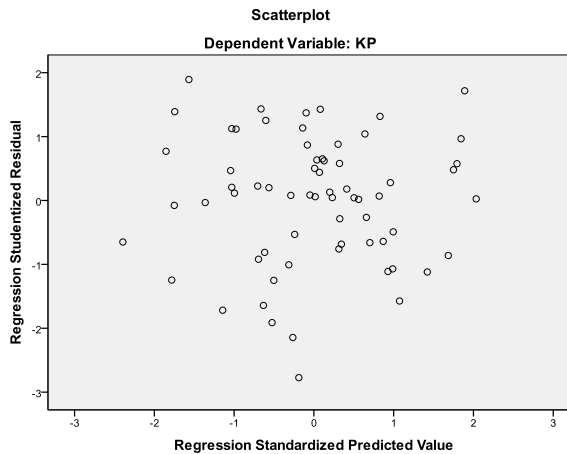
a. Dependent Variable: KP

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel terlihat bahwa variabel independen yaitu PAD, BM dan TA mempunyai angka *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah angka 10 dan Tolerance di atas 0,10, Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ketiga variabel independen diatas tidak terdapat persoalan multikolinieritas.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik plot.

Gambar 4.2.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Menurut Ghozali (2006:139) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y seperti pada grafik di atas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada gangguan heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada titik-titiknya. Titik-titiknya juga menyebar di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Uji heteroskedastisitas dapat juga menggunakan uji glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003:405)

Tabel 4.5
Uji Glejser

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.527	.389		1.354	.181
	Ln_PAD	-.007	.026	-.045	-.249	.804
	Ln_BM	.024	.031	.123	.770	.444
	Ln_TA	-.033	.033	-.181	-.990	.326

a. Dependent Variable: ABSRES_1
Sumber: Hasil Data Olah SPSS

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa variabel independen menunjukkan probabilitas tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.

4.2.5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Durbin Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Interval
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak diputuskan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Tidak diputuskan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$Du < d < 4-du$

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics			Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.632 ^a	.399	.370	.399	13.712	.000	1.710

a. Predictors: (Constant), Ln_TA, Ln_BM, Ln_PAD

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 1.628. Untuk taraf signifikansi 5% dengan jumlah variabel independen (k)= 3 diperoleh dL = 1.525 dan dU = 1.703 sehingga diperoleh $4-dU$ = 2.297 maka hasil analisis yang diperoleh oleh nilai DW sebesar 1.710 berarti terletak pada interval $1.703 < dw < 2.297$ sehingga model regresi menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi positif atau negatif.

B. Pengujian Hipotesis

Setelah terpenuhinya normalitas data maka akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda, koefisien determinasi (R^2), Uji F secara simultan dan uji-t secara parsial.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil uji asumsi klasik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 19.0, maka model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 4.8

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.602	.654		.921	.361
	Ln_PAD	.233	.044	.746	5.269	.000
	Ln_BM	-.122	.053	-.291	-2.315	.024
	Ln_TA	.001	.056	.003	.019	.985

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa:

$$Y = 0,602 + 0,233 X_1 - 0,122X_2 + 0,001X_3 + \epsilon$$

- Konstanta sebesar Rp 0,602 atau setara dengan Rp 602.000.000, artinya pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah (konstan) maka kinerja pemerintah daerah adalah sebesar Rp 0,602 dalam miliaran rupiah. Hal tersebut

menandakan kinerja pemerintah daerah tetap akan terjadi sebesar Rp.2.503.000.000 pada provinsi tahun periode 2010 hingga 2011.

- b. Koefisien variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,233, artinya ketika belanja pendapatan asli daerah meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,233. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan belanja modal Rp.1.000 diprediksi akan menurunkan pendapatan asli daerah Rp 233. Koefisien bertanda negatif yang berarti apabila belanja modal bertambah maka pendapatan asli daerah akan berkurang.
- c. Koefisien variabel belanja modal sebesar -0,122, artinya ketika belanja modal meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,122. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan belanja modal Rp 1.000 diprediksi akan menurunkan pendapatan asli daerah Rp 109. Koefisien bertanda negatif yang berarti apabila belanja modal bertambah maka kinerja pemerintah daerah akan berkurang.
- d. koefisien variabel total aset sebesar 0,001. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,001. Angka yang diasumsikan setiap peningkatan total aset Rp 1.000 diprediksi akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar Rp 1.

4.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi, belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi dan total aset berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Pengujian uji kesesuaian dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu model regresi, karena variabel penelitian lebih dari dua variabel maka kelayakan tersebut dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*.

Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics		
				R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.632 ^a	.399	.370	.399	13.712	.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Nilai *Adjusted R Square* pada Tabel di atas sebesar 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa 39,9% variable kinerja pemerintah daerah provinsi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal dan total aset. Sisanya sebesar 60,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil uji hipotesis, selanjutnya dilakukan uji signifikan.

4.3.2. Uji F

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat.

Untuk menguji ini, maka dilakukan uji statistika F. Nilai F dapat dilihat dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.756	3	1.252	13.712	.000 ^a
	Residual	5.661	62	.091		
	Total	9.416	65			

a. Predictors: (b. Dependent Variable: KP

Hasil uji ANOVA antara Pendapatan asli daerah (X_1), Belanja modal (X_2) dan Total aset (X_3) terhadap Kinerja pemerintah daerah provinsi (Y) diperoleh hasil signifikan F sebesar $000 < \text{taraf signifikan } 0,05$.

Nilai tabel F didapat dari $df_1=k-1$ ($4-1=3$) dan $df_2=n-k$ ($66-4=62$), dimana k adalah jumlah variabel (bebas dan terikat) dan n adalah jumlah observasi/sampel pembentuk regresi. Nilai F tabel untuk penelitian ini adalah 4,73 ($df_1=3$ dan $df_2=62$).

4.3.3. Uji-t

Uji t dilakukan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini dilakukan dengan derajat kebebasan sebesar 5% agar kemungkinan terjadinya gangguan lebih kecil.

Dengan kriteria pengujian:

- a. Terima, H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

b. Tolak, H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Tabel 4.11
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.602	.654		.921	.361
Ln_PAD	.233	.044	.746	5.269	.000
Ln_BM	-.122	.053	-.291	-2.315	.024
Ln_TA	.001	.056	.003	.019	.985

a. Dependent Variable: KP

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan (H_1) pada penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.11, variabel pendapatan asli daerah memiliki $t_{hitung} = 5,269$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,997 < 5,269$) dan nilai signifikansi variable $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan (H_1) diterima dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan (H_2) pada penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.11, variabel belanja modal memiliki $t_{hitung} = -2,315$ dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ ($1,997 < 2,315$) dan nilai signifikansi variable $0,024 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan (H_2) diterima dan dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan (H_3) pada penelitian ini menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.11, variabel ukuran daerah memiliki $t_{\text{hitung}} = 0,019$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ ($1,997 > 0,019$) dan nilai signifikansi variable $0,985 > 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan (H_3) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah Provinsi

Dari hasil uji t didapat variabel pendapatan asli daerah memiliki koefisien 0,269, dengan tingkat signifikansi 00 artinya secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja

Pemerintah daerah. Serta penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan *intergovernmental revenue* diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu penerimaan pendapatan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat kinerja pemerintah daerah mau tidak mau peranan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan. Sehingga perlu mengupayakan peningkatan efisiensi, efektivitas, efektivitas dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Permasalahannya sekarang masih banyak pendapatan daerah yang belum direalisasikan disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah, lemahnya hukum dan rumitnya birokrasi dalam menjalankan programnya. Semakin besar potensi pendapatan asli daerah akan mempengaruhi seberapa besar pertanggungjawaban daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai timbal balik yang positif kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai yang memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri terutama dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya dapat dioptimalkan semaksimal mungkin demi tercapainya peningkatan skor kinerja pemerintah daerah

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah daerah Provinsi

Setelah dilakukan uji t, variabel belanja modal memiliki koefisien 2,315 dengan tingkat signifikansi 0,024 ($0,024 < 0,05$), dapat dikatakan belanja modal

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa dengan total belanja yang besar ternyata membuat kinerjanya semakin tidak baik. Hal ini tidak mendukung dengan penelitian Sudarsana (2012) yang menyimpulkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung dengan minimnya belanja modal yang dikarenakan masih banyak daerah yang didominasi dengan belanja pegawai dan barang sehingga daerah yang sulit berkembang karena pembangunan yang kurang maksimal karena APBD-nya terkuras untuk gaji pegawai sehingga perlu turun tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah kurang menekankan pentingnya belanja modal sehingga untuk pengalokasiannya memiliki porsi yang lebih kecil dibanding belanja pegawai yang bersifat rutin. Padahal seharusnya pemerintah menempatkan belanja modal dengan porsi yang seimbang dengan belanja pegawai sehingga kinerja pemerintah daerah meningkat dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini pemerintah daerah harus dapat menetapkan porsi sesuai antara belanja modal dibanding belanja rutin dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran dan tetap memperhatikan kualitas belanja.

3. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap kinerja Kinerja Pemerintah daerah Provinsi

Setelah dilakukan uji t variabel ukuran daerah memiliki tingkat signifikansi 0,985 ($0,985 > 0,05$) dengan koefisien 0,019, yang berarti ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada total aset. Total aset tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berlawanan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyimpulkan bahwa total aset berpengaruh positif signifikan dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar ukuran daerah maka semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah, yang sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola aset daerahnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, seperti kurangnya pemahaman terhadap manajemen aset daerah, sehingga banyak diantaranya yang meminta bantuan pihak ketiga/konsultan. Aset daerah dapat lebih bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik (LAN). Seringkali aset daerah dimanipulasi oleh pemerintah daerahnya sendiri. Konflik kepentingan menjadi salah satu penyebabnya, seharusnya aset disesuaikan dengan kebutuhan setiap pemerintah daerah. Kebutuhan aset dapat direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan penganggaran keuangan daerah, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset

daerah. Pemerintah daerah berkewajiban mengelola aset seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemakaian variabel kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung memberikan kritik terhadap efektifitas, efisiensi dan profesionalisme penyajian laporan keuangan pemerintah daerah agar nilai informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut dapat dievaluasi dan akuntabel lebih berguna bagi penggunaannya. Laporan keuangan tersebut perlu dipublikasikan agar masyarakat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya sehingga sasaran tata kelola pemerintah yang baik akan tercapai.

BAB V

KESIMPULAN IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi pada tahun 2010-2011. Selanjutnya untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemda. Tujuan terakhir adalah mengetahui pengaruh empiris pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemda. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. Meningkatnya pendapatan asli daerah menyebabkan peningkatan kinerja yang dilakukan pemda provinsi. Sebaliknya kinerja pemerintah daerah provinsi cenderung menurun saat pendapatan asli daerah rendah. Seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah agar meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat.
2. Belanja modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pemda. Ketika penggunaan belanja modal meningkat, maka kinerja pemerintah daerah cenderung menurun. Hal ini disebabkan, dalam realisasinya pemerintah daerah kurang tepat mengalokasikan belanja modal. Pemerintah daerah cenderung meningkatkan

belanja rutin dibandingkan belanja modalnya. Belanja modal yang tepat sasaran mengindikasikan tercapainya tujuan pembangunan dan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.

3. Tidak terdapat pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemda, ini menunjukkan ukuran daerah yang mengacu pada total aset pemerintah daerah belum berfungsi secara maksimal dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Sebanyak apapun asset yang dimiliki daerah tidak mempengaruhi kinerja pemda sehingga total aset daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah.

B. Implikasi

1. Terkait dengan hasil yang dikemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah maka penelitian memberikan gambaran kepada pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga diperlukan peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan melalui sector pajak dan retribusi. Misalnya DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah provinsi menaikkan tarif retribusi parkir, menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (menaikkan nilai jual objek pajak), dan meningkatkan potensi pariwisata. Dari kinerja yang telah dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah di tahun 2010-2011.

2. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Semakin meningkatnya belanja modal, akan menurunkan kinerja pemerintah daerah. Rendahnya realisasi belanja modal akan memperlambat pembangunan infrastruktur di suatu provinsi. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah, mengalokasikan belanja modal untuk kepentingan public masih rendah efektivitasnya. Pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan belanja yang bersifat rutin dibandingkan belanja modal. Belanja rutin bersifat konsumtif, sedangkan belanja modal bersifat investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Pengalokasian belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dilakukan selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah. Belanja modal yang efektif dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk fasilitas umum bagi masyarakat. Belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, misalnya dengan penyediaan fasilitas layanan pendidikan yaitu: pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas penunjang sekolah lainnya.
3. Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran daerah, yang mengacu pada total aset tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Total asset suatu daerah yang terlalu besar mengakibatkan pemerintah daerah sulit mengelola, memonitor dan mengawasi penggunaannya

secara langsung. Hal ini dapat diakibatkan oleh perbandingan luasnya daerah dengan jumlah pegawai pemerintah provinsi tidak sebanding di Indonesia. Dalam mengelola asset daerah, pemerintah daerah pemerintah daerah harus memperhatikan penganggaran dan kebutuhan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Jika pengelolaan asset daerah dilakukan dengan benar pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan manfaat asset bagi pemerintah daerah.

C. Saran Penelitian

Atas dasar keterbatasan tersebut maka peneliti mengajukan beberapa saran diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah:
 - a. potensi yang dimiliki daerah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memiliki pendapatan asli daerah dan ukuran daerah yang besar. Pemda yang memiliki ukuran daerah dan pendapatan asli daerah yang besar seharusnya memiliki kinerja pemda yang baik. Namun jika sebaliknya pemda harus memperbaiki tata kelola pemerintahannya lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat.
 - b. Menurut penelitian ini, besarnya belanja modal tidak diimbangi dengan skor kinerja yang baik. Hal ini bisa disebabkan karena pemda meminimalisir porsi

belanja modal dibandingkan belanja rutin. Belanja modal sebaiknya ditingkatkan jumlahnya untuk pembangunan, pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemda seharusnya dapat menentukan porsi belanja yang tepat sesuai kebutuhan daerahnya bukan keinginan pihak terkait.

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh kecil terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 39,9 %. Dengan demikian, 61,1% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel yang lain seperti misalnya dana alokasi umum, leverage, jumlah pegawai dan luas wilayah.
3. Penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa, sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian dengan tidak hanya menggunakan data provinsi tetapi kabupaten/kota serta menambah periode penelitian yang lebih panjang agar dapat digunakan untuk analisa jangka panjang. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel juga perlu diperhatikan sehingga sampel yang digunakan akan lebih banyak dan beragam agar dapat mewakili karakteristik populasi yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2010*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 2 April 2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2010*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 2 April 2013.
- Badan Pemeriksaa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2011*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 2 April 2013.
- Badan Pemeriksaa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2011*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 2 April 2013.
- Cohen, S dan Kaimenakis. 2008. *An Empirical Investigation of Greek Municipalities' Quality of Financial Reporting*. Working paper series
- Dalimunthe, Tigor Mulia. 2010. *Review Kinerja Pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Dhuanovawati, Morgan. 2010. *Analisis Atas Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Untuk Tahun Anggaran 2008*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan. *Laporan Neraca Tahun 2010*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> diakses pada 1 Juni 2013.
- Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan. *Laporan Neraca Tahun 2011*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> diakses pada 1 Juni 2013.
- Fitriasari, Debby., dan Mustikarini, Widya. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

- Irianto, Gugus. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh" *Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus 2012, h. 1-15
- Kementrian Dalam Negeri RI. *Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010*. <http://www.otda.kemendagri.go.id>
- Kementrian Dalam Negeri RI. *Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011*. <http://www.otda.kemendagri.go.id>
- Khusaini, Mokh. 2004. *Kinerja Pemerintah Daerah di era Desentralisasi Fiskal: Analisis Dampak Anggaran Daerah terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang*.
- Mahmudi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Martani, Dwi., dan Zaenal, Fazri. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2 No. 1. <http://www.bppk.depkeu.go.id> diakses pada 1 November 2013
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Purba, Adearman. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun*. Tesis Pasca Sarjana. USU. Medan.
- Puspita, Rora. 2010. *Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs Pemda Tahun 2010*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Manajemen Pemerintah Daerah. <http://www.pkkod.lan.go.id> diakses tanggal 1 Desember 2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

- Siswantoro, Dodik., dan Kuswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R.R. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Widya. 2010, Ruang Fiskal Daerah Didominasi Belanja Rutin. <http://www.koran-jakarta.com> diakses tanggal 1 Desember 2013
- Zelda, Retina. 2008. *Tingkat Kepatuhan Pemda/Kota Di Indonesia Terhadap PP No 24 Tahun 2005 Dan Hubungannya Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Total Aktiva*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

Lampiran 1

Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi tahun 2010-2011 (dalam juta rupiah)

Hasil olah data LKPD DJPK dan BPK

No	Provinsi	2010	2011
1	Aceh	796,949	802,840
2	Sumatera Utara	2,554,780	3,578,462
3	Sumatera Barat	1,006,820	1,224,414
4	Jambi	686,629	984,232
5	Riau	1,700,950	2,210,130
6	Kepulauan Riau	521,053	620,901
7	Sumatera Selatan	1,369,935	1,849,119
8	Bengkulu	351,091	440,920
9	Kepulauan Bangka Belitung	328,122	459,208
10	Lampung	1,111,209	1,395,675
11	Banten	2,321,748	2,895,569
12	DKI Jakarta	12,891,992	17,825,987
13	Jawa Barat	7,252,243	8,502,566
14	Jawa Tengah	4,785,133	5,564,233
15	Yogyakarta	740,202	867,112
16	Jawa timur	7,275,089	8,898,616
17	Bali	1,393,730	1,723,617
18	Nusa Tenggara Timur	298,154	391,828
19	Nusa Tenggara Barat	515,340	741,291
20	Kalimantan Barat	777,243	1,080,421
21	Kalimantan Tengah	504,217	815,244
22	Kalimantan Selatan	1,286,258	1,868,594
23	Kalimantan Timur	2,711,299	4,503,675
24	Sulawesi Utara	418,737	535,087
25	Sulawesi Selatan	1,545,589	1,959,515
26	Sulawesi Tengah	411,797	519,974
27	Sulawesi Barat	90,207	114,310
28	Sulawesi Tenggara	339,360	346,169
29	Gorontalo	133,124	158,083
30	Maluku	169,568	221,882
31	Maluku Utara	77,842	84,811
32	Papua Barat	125,853	152,163
33	Papua	380,025	363,100

Lampiran 2

Data Belanja Modal (dalam juta rupiah)

Hasil olah data LKPD DJPK dan BPK

No	Provinsi	2010	2011
1	Aceh	3,267,911	1,473,983
2	Sumatera Utara	716,934	1,063,237
3	Sumatera Barat	583,067	525,003
4	Jambi	465,860	518,750
5	Riau	1,238,746	1,342,180
6	Kepulauan Riau	657,183	259,907
7	Sumatera Selatan	1,032,890	1,139,120
8	Bengkulu	165,061	220,889
9	Kepulauan Bangka Belitung	313,362	487,557
10	Lampung	425,809	631,250
11	Banten	826,562	717,408
12	DKI Jakarta	5,243,146	7,316,333
13	Jawa Barat	1,055,536	718,650
14	Jawa Tengah	419,476	464,327
15	Yogyakarta	123,424	142,793
16	Jawa timur	877,876	1,045,361
17	Bali	201,468	227,119
18	Nusa Tenggara Timur	176,558	195,335
19	Nusa Tenggara Barat	144,557	450,063
20	Kalimantan Barat	376,896	419,083
21	Kalimantan Tengah	541,293	432,339
22	Kalimantan Selatan	677,301	596,845
23	Kalimantan Timur	1,653,969	1,776,202
24	Sulawesi Utara	164,360	233,630
25	Sulawesi Selatan	303,648	467,685
26	Sulawesi Tengah	203,792	208,496
27	Sulawesi Barat	205,063	230,691
28	Sulawesi Tenggara	235,363	341,497
29	Gorontalo	108,996	147,208
30	Maluku	158,861	254,938
31	Maluku Utara	192,525	188,066
32	Papua Barat	1,404,550	606,120
33	Papua	995,882	1,421,658

Lampiran 3

Data Total Aset (dalam juta rupiah)

Hasil olah data LKPD DJPK dan BPK

No	Provinsi	2010	2011
1	Aceh	20,076,760	16,643,584
2	Sumatera Utara	12,199,119	10,429,628
3	Sumatera Barat	6,483,495	7,325,828
4	Jambi	4,454,830	5,553,904
5	Riau	18,909,603	21,447,952
6	Kepulauan Riau	3,063,509	3,380,920
7	Sumatera Selatan	13,271,032	14,596,129
8	Bengkulu	1,799,234	2,430,267
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,799,234	2,430,267
10	Lampung	5,946,992	5,462,546
11	Banten	7,184,290	7,925,494
12	DKI Jakarta	6,876,423	8,507,327
13	Jawa Barat	18,726,528	21,334,985
14	Jawa Tengah	13,521,970	15,857,872
15	Yogyakarta	4,925,003	5,122,085
16	Jawa timur	31,455,579	33,522,820
17	Bali	13,521,970	15,857,872
18	Nusa Tenggara Timur	4,799,163	4,569,984
19	Nusa Tenggara Barat	3,539,615	4,074,233
20	Kalimantan Barat	2,799,828	3,370,175
21	Kalimantan Tengah	4,920,908	5,763,199
22	Kalimantan Selatan	7,146,480	8,594,229
23	Kalimantan Timur	18,533,120	21,910,535
24	Sulawesi Utara	2,232,325	2,602,141
25	Sulawesi Selatan	10,361,243	10,811,911
26	Sulawesi Tengah	3,803,404	3,997,858
27	Sulawesi Barat	807,502	4,841,570
28	Sulawesi Tenggara	3,803,104	3,997,858
29	Gorontalo	1,251,730	1,559,347
30	Maluku	3,944,416	4,419,988
31	Maluku Utara	1,100,677	7,504,040
32	Papua Barat	3,333,281	4,003,785
33	Papua	13,900,151	53,241,620

Lampiran 4

Data Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Hasil olah data Dirjen OTDA Kemendagri

No	Provinsi	2010	2011
1	Aceh	2.27	1.81
2	Sumatera Utara	2.21	2.29
3	Sumatera Barat	2.34	2.04
4	Jambi	1.32	2.42
5	Riau	2.28	2.35
6	Kepulauan Riau	1.56	2.35
7	Sumatera Selatan	2.64	2.45
8	Bengkulu	1.82	1.98
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.09	2.42
10	Lampung	2.19	2.08
11	Banten	2.17	2.12
12	DKI Jakarta	2.24	2.42
13	Jawa Barat	2.35	2.69
14	Jawa Tengah	2.76	2.92
15	Yogyakarta	2.34	2.66
16	Jawa timur	2.77	3.14
17	Bali	2.10	2.00
18	Nusa Tenggara Timur	1.71	2.15
19	Nusa Tenggara Barat	2.41	2.58
20	Kalimantan Barat	2.39	2.53
21	Kalimantan Tengah	2.12	2.22
22	Kalimantan Selatan	2.27	2.27
23	Kalimantan Timur	2.33	2.51
24	Sulawesi Utara	2.50	2.43
25	Sulawesi Selatan	2.41	2.79
26	Sulawesi Tengah	1.49	2.21
27	Sulawesi Barat	2.18	2.37
28	Sulawesi Tenggara	1.50	1.75
29	Gorontalo	2.08	2.01
30	Maluku	1.99	2.29
31	Maluku Utara	1.97	1.75
32	Papua Barat	1.44	1.40
33	Papua	1.42	1.86

Lampiran 5

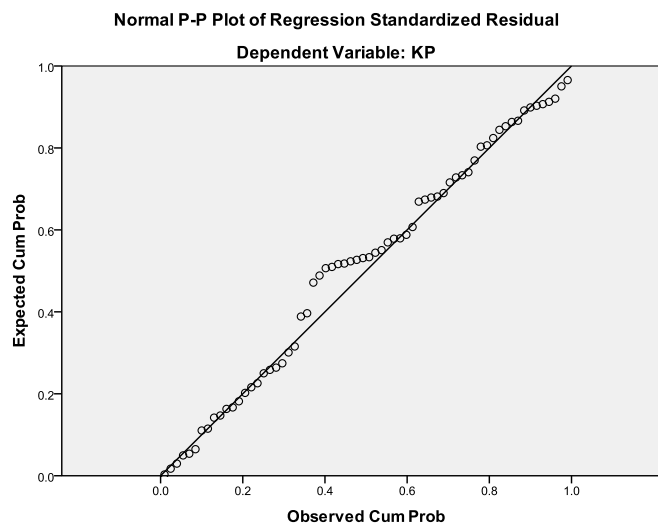
Hasil Pengolahan SPSS

1. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	66	1.3206	3.1482	2.195912	.3806154
PAD	66	77842	17825987	1978364.18	3145144.736
BM	66	108996	7316333	779115.88	1130328.202
TA	66	807502	53241620	9321873.15	9039513.929
Valid N (listwise)	66				

2. Uji Normalitas

a. Normal P-Plot



b. Skewness-Kurtosis

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	66	-.466	.295	.085	.595
Valid N (listwise)	66				

c. Kolmogrov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29510548
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.045
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.916
Asymp. Sig. (2-tailed)		.371

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ln_PAD	.499	2.006
Ln_BM	.572	1.748
Ln_TA	.397	2.522

a. Dependent Variable: KP

4. Uji Heterokedastisitas

a. Uji Glesjer

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.527	.389		1.354	.181
Ln_PAD	-.007	.026	-.045	-.249	.804
Ln_BM	.024	.031	.123	.770	.444
Ln_TA	-.033	.033	-.181	-.990	.326

a. Dependent Variable: ABSRES_1

5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics			Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.632 ^a	.399	.370	.399	13.712	.000	1.710

a. Predictors: (Constant), Ln_TA, Ln_BM, Ln_PAD

b. Dependent Variable: KP

6. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics		
				R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.632 ^a	.399	.370	.399	13.712	.000

b. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.756	3	1.252	13.712	.000 ^a
	Residual	5.661	62	.091		
	Total	9.416	65			

a. Predictors: (b. Dependent Variable: KP

c. Uji-t

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.602	.654		.921	.361
	Ln_PAD	.233	.044	.746	5.269	.000
	Ln_BM	-.122	.053	-.291	-2.315	.024
	Ln_TA	.001	.056	.003	.019	.985

a. Dependent Variable: KP

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Afifah Firdiyanti, Lahir di Jakarta, 26 Januari 1991. Anak Kedua dari pasangan Bapak Yudi Ahmad dan Ibu Sri Puryanti. Bertempat tinggal di Komplek Garuda Cipondoh Permai jl. Gitar blok f No. 6, Tangerang Banten 15148.

Penulis telah menempuh beberapa tingkat pendidikan formal yaitu telah yaitu SDIT Asy-syukriyyah (1997-2003), SMP Negeri 4 Tangerang (2003-2006), dan SMA Negeri 1 Tangerang (2006-2009). Penulis juga merupakan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2009. Penulis turut aktif di lembaga organisasi kampus seperti menjadi staf Divisi Dana Usaha Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi UNJ (2009-2010).